

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang tak kunjung tuntas di Indonesia, ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat telah menyebabkan banyak perusahaan memilih untuk menggunakan mesin dari pada tenaga manusia dalam operasi mereka. Hal ini menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja di masyarakat dan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh jumlah penduduk dan angkatan kerja yang tinggi namun lapangan kerja yang relatif sedikit, serta tidak dimenjadi sebagai asset potensial yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan roda perekonomian tetapi menjadi beban negara dalam pembangunan.¹

Seperti yang diketahui bahwa dalam keluarga miskin pihak perempuan kerap kali mengalami diskriminasi yang cukup besar baik dari pihak keluarga sendiri ataupun masyarakat luar. Dimana, mereka akan dianggap sebagai beban bagi keluarga terlebih jika nanti mereka sudah masuk pada jenjang pernikahan, yang mana setelah menikah kesenjangan tersebut semakin terlihat jelas dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar perempuan yang sudah menikah cenderung mengambil peran sebagai ibu rumah tangga, dengan hanya mengandalkan penghasilan suami. Banyaknya isu-isu yang beterbangan dikalangan masyarakat dan kecaman dari lingkungan sekitar seringkali menjadi

¹Mohamad Ibnu Dinar, Nurfahmiyati, "Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Pada Tahun 2011-2021", *Bandung Conference Series, Economics Studies*, Vol.2, No.1, (2022),211.

faktor utama rendahnya partisipasi perempuan dalam dunia ekonomi. Hal ini didukung oleh penghitungan badan pusat statistik dibawah ini:

Tabel 1.1
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Kediri
Tahun 2023 – 2025

Status keadaan ketenaga kerjaan	2023	2024	2025	Perubahan		Perubahan	
				2023-2024		2025	
	Orang	Orang	Orang	Orang	Persen	Orang	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja	234.274	231.562	234.550	-2.712	-1,16	2.988	1,29
Angka Kerja	163.821	166.321	165.918	2.500	1,53	-403	-0,24
-Bekerja	156.641	159.567	159.426	2.926	1,87	-141	-0,09
-Pengangguran	7.180	6.754	6492	-426	-5,93	-262	-3,88
Bukan Angkatan Kerja	70.453	65.241	68.632	-5.212	-7,40	3.391	5,20
	Persen	Persen	Persen	Persen		Persen	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,38	4,06	3,91	-0,32		-0,15	
- Laki-laki	3,86	4,18	4,02	0,32		-0,16	
- Perempuan	5,03	3,9	3,77	-1,13		-0,13	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK))	69,93	71,83	70,74	1,90		-1,09	
- Laki-Laki	78,55	83,35	80,99	4,80		-2,3	
- Perempuan	61,44	60,37	60,55	-1,07		0,18	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri²

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat jelas perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan perempuan dimana perempuan hanya mencapai 60,55% dan laki-laki mencapai 80,99% di Tahun 2025. Padahal seperti yang kita tau bahwa perempuan perlu mendapatkan keadilan dan kesetaraan dengan

²<https://kedirikota.bps.go.id/id/pressrelease/2025/15/01/328/keadaan-ketenagakerjaan-kota-kediri-tahun-2025.html>

laki-laki baik dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Perempuan mempunyai potensi yang cukup besar dalam menjaga lingkungan hidup, banyak juga dari mereka yang sudah berkesimpulan bahwa perempuan mampu menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang muncul di lingkungan sekitar mereka. Potensi campur tangan perempuan memiliki peranan sentral dalam melakukan perubahan disuatu wilayah. Perempuan hadir menjadi bagian yang sangat menarik, sehingga menjadikan perannya adalah bagian yang harus dilibatkan dalam perekonomian dan kehidupan sosial guna mendorong suatu wilayah tersebut dapat berkembang. Kedudukan seorang perempuan akan meningkat apabila ia mampu berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan dalam menghadapi permasalahan kesehariannya. Tidak hanya melahirkan anak dan bergantung pada suami tetapi dapat membawa banyak dampak positif bagi pembangunan suatu bangsa.³

Menyikapi hal tersebut, pemberdayaan ekonomi perempuan adalah terobosan yang sangat mumpuni untuk meningkatkan kesetaraan perempuan dan partisipasi perempuan dalam perekonomian. Selain itu dalam aspek muamalah pemberdayaan merupakan sebuah upaya penting yang berkaitan langsung dengan pembinaan dan perubahan masyarakat. Karta Sasmita mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong memotivasi membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi

³Juwita Pratiwi Lukman, "Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan", *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Research*. Vol.2, No.8, (2024),89.

yang dimiliki masyarakat.⁴

World Economic Forum mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci bagi peningkatan pendapatan nasional dan kemajuan suatu negara. Mendukung pernyataan ini, BPS Indonesia mencatat bahwa populasi perempuan di Indonesia mencapai 49,42%. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peluang besar untuk memajukan bangsa jika diberdayakan dengan tepat. Keterlibatan perempuan dalam perekonomian juga bergantung pada keterbukaan untuk menerima pendidikan yang tersedia.⁵

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bekerjasama dengan Lembaga Pesantren membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yakni Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan lembaga keuangan non-perbankan yang menawarkan akses modal dan pembiayaan tanpa agunan, dengan fokus pada pendampingan ekonomi umat untuk masyarakat kecil yang belum terdaftar atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal dengan target utama adalah kelompok perempuan. Kementerian Agama RI menyebutkan pesantren memiliki potensi hingga 28,194% untuk memperdayakan umat sekaligus berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.⁶

Bank Wakaf Mikro (BWM) menyediakan pembiayaan tanpa agunan dengan jumlah maksimum Rp 3 juta, serta biaya ijarah sebesar 3% per tahun

⁴Ginjar Kartasmita, *“Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan”*, (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo,1996),145.

⁵World Economic Forum, *“Global Gender Gap Report 2020”*, Committed To Improving The State Of The World, (2019)

⁶Fakhrudin, Ahmad Sidi Pratomo, *“Bank Wakaf Mikro dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah”*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol.13, No. 2, (2021), 324-325.

untuk jasa pendampingan usaha. Di samping itu, Bank Wakaf Mikro mengimplementasikan skema pembiayaan yang mengelompokkan dana ke dalam komunitas usaha yang dikenal sebagai KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia), yang telah disepakati oleh setiap anggota sejak awal pengajuan.⁷

Pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) mencerminkan komitmen OJK dan pemerintah dalam memperluas akses keuangan untuk masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah dan kecil. Berdasarkan laporan SP 02/DHMS/OJK/I/2020, OJK melaporkan bahwa terdapat 56 Bank Wakaf Mikro yang telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan 25.631 nasabah yang mendapatkan manfaat dan total pembiayaan mencapai Rp33,92.⁸

Bank Wakaf Mikro (BWM) Dikota Kediri sendiri telah berdiri yakni Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Makmur Sejahtera yang terletak di Pondok Pesantren Al-Amien Kediri, tepatnya di Jalan Ngasinan Raya No. 18, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. lembaga ini secara resmi didirikan pada tahun 2018 melalui kerjasama Lembaga Amil Zakat milik Bank Syariah Indonesia (BSI) yang berfokus pada pengelolaan dana ZISWAF atau lebih tepatnya dana wakaf produktif milik BSI dan yayasan Peramu yakni lembaga milik pesantren yang meramu masyarakat sekitar pesantren. Lembaga ini menyediakan pembiayaan tanpa agunan dalam bentuk *Qardul Hasan* dengan sistem tanggung renteng yang bertujuan guna mengurangi risiko gagal bayar

⁷Syafrin Aulia Annis, dkk, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang", *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*. Vol 8, No 1. (2024),155.

⁸Ibid,155.

yang akan timbul di kemudian hari. Selain itu, lembaga ini hanya fokus pada penyediaan pembiayaan kelompok perempuan terkhusus ibu rumah tangga baik yang masih memiliki suami atau ibu tunggal.

Tanggung renteng berarti beberapa individu bertindak sebagai debitur bersama di hadapan satu kreditur. Jika salah satu debitur melunasi utangnya, hal tersebut akan membebaskan anggota lainnya dari kewajiban utang. Artinya jika salah satu Anggota mengalami masalah dalam membayar angsuran anggota yang lain diwajibkan untuk membantu menyelesaikan pembayaran pada hari yang sama.⁹ Sistem tanggung renteng dirancang guna menanamkan sikap tanggung jawab dan amanah di antara anggota kelompok, yang dapat memotivasi mereka untuk melunasi angsuran tepat waktu.¹⁰

Selain itu, sistem ini mengajarkan pentingnya saling membantu dan membangun kepercayaan antar anggota. Ketika kepercayaan telah terbangun, keyakinan dan kepatuhan terhadap komitmen juga akan muncul. Dalam proses pengangsuran, jika ada anggota yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran, seluruh anggota kelompok diharuskan untuk saling membantu menyelesaikan kewajiban tersebut. Langkah ini dapat mengurangi terjadinya risiko pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).¹¹ Namun, ketika nanti terjadi pembiayaan macet Lembaga Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera akan membuat beberapa tahapan penyelesaian. Dimana jika pembiayaan macet masih dalam kategori tidak parah maka

⁹Salim, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022),176.

¹⁰Gatot Supriyanto, “*Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*”, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009),36.

¹¹Try Widiyono, “*Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab*”, (Bogor: Ghalia Indonesia,2008),115.

lembaga akan melakukan penagihan langsung kerumah-rumah nasabah atau *door to door*. Kemudian jika pembiayaan macet sudah pada tahapan lanjut maka pihak lembaga restrukturisasi atau penjadwalan ulang jangka waktu pengansuran.

Adapun proses pembiayaan dilakukan secara berkelompok di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang atau lebih. Selain itu, setiap kelompok wajib mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) selama lima hari berturut-turut, setelah itu dana pembiayaan akan dicairkan oleh lembaga ini tepat pada hari terakhir pelatihan. Selain itu, Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Makmur Sejahtera juga menyediakan pendampingan usaha atau HALMI (Halaqah Mingguan) yang dilakukan setiap minggu dan dihadiri oleh supervisor atau perwakilan dari lembaga sendiri yang bertepatan dengan pembayaran angsuran.

Tercatat tingkat pembiayaan dan prosentase nasabah gagal diberdayakan di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera dari tahun 2018-2025 menunjukkan nilai yang cukup bagus. Dimana terhitung pembiayaan per 25 Agustus 2025 mencapai 193 nasabah dengan Rp 252.000.000 pembiayaan. Dan prosentase pertahun nasabah gagal berdaya hanya sampai pada angka 10% dari total keseluruhan pemberdayaan. Diantaranya data lainnya tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Nasabah, Jumlah Pembiayaan, Prosentase dan Jumlah
Nasabah Gagal Diberdaya
Di Bank Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri
Dari Tahun 2018-2025

Tahun	Jumlah Nasabah PA (Orang)	Jumlah Pembiayaan	Prosentase Nasabah Gagal	Jumlah Nasabah Gagal (Orang)
2018	194	Rp. 233.000.000	10%	19
2019	275	Rp. 417.500.000	10%	28
2020	175	Rp. 323.500.000	10%	18
2021	187	Rp. 356.000.000	10%	19
2022	225	Rp. 443.000.000	10%	23
2023	149	Rp. 366.000.000	10%	15
2024	134	Rp. 375.000.000	10%	13
2025	193	Rp. 252.000.000	10%	19

Sumber: Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa prosentase nasabah gagal yang diberdayakan oleh bank wakaf mikro amanah makmur sejahtera dari total keseluruhan nasabah yang diberdayakan terbilang cukup jauh dimana angka prosentase menyentuh 10% dari keseluruhan anggota nasabah perempuan yang mengikuti pemberdayaan ekonomi.

Selain dari pada itu, persyaratan yang diberikan Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Makmur Sejahtera tidak begitu sulit. Dimana calon nasabah selian haruslah ibu rumah tangga baik itu yang bersuami atau ibu tunggal, mereka tidak harus memiliki usaha asalkan dalam keluarga mereka masih ada anggota keluarga yang memiliki pendapatan. Tidak hanya itu mekanisme pemberdayaannya bukan hanya fokus pada pemberian dana tetapi juga menyertakan pendampingan umat pada pihak nasabah menjadikan

terrealisasikannya pemberdayaan perempuan dimana Ginanjar Karta Sasmita menyinggung bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, mendorong memotivasi, membangkitkan kesadaran dan berupaya untuk mengembangkan potensi-potensi dimiliki oleh masyarakat.

Selain itu, hal ini menjadikan kelompok perempuan memiliki hak dan kontribusi serta kebebasan yang sama dengan pihak laki-laki dalam berkiprah didunia ekonomi. Pada dasarnya kedudukan perempuan akan meningkat apabila ia mampu berdiri sendiri dan mempunyai kemampuan dalam menghadapi permasalahan kesehariannya. Dengan tidak hanya melahirkan keturunan dan bergantung pada hasil jerih payah suami.

Sejalan dengan itu, *Sustainable Development Goals* (SDGs), atau pembangunan berkelanjutan yang mengusung konsep pembangunan yang secara organik menggabungkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini tanpa melepas kepentingan generasi berikutnya dalam menjalani kehidupan yang lebih layak, dengan perspektif dan konsep baru. Dapat dikatakan bahwa *Sustainable Development Goals* adalah pembangunan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.¹²

Sustainable Development Goals (SDGs), atau pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang terdiri dari 17 tujuan utama dan

¹²Ririn Tri Puspita Ningrum, Faridatul Fitriyah, "Implementasi Manajemen Keuangan Inklusif Bank Wakaf Mikro Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) Di Kota Kediri: Studi Komparasi Antara Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Dan Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera", *El-Wasathiya*. Vol.12, No.1, (2024),3.

169 target. Agenda ini diadopsi oleh semua anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada 25 September 2015 melalui resolusi berjudul *Transforming Our World: The 2030 For Sustainable Development Goals* (SDGs), atau pembangunan berkelanjutan merupakan kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berlangsung dari 2000-2015.¹³ Inisiatif ini bertujuan memastikan terciptanya kehidupan yang layak dan makmur serta terbebas dari kemiskinan bagi seluruh generasi, baik sekarang maupun mendatang. Dimana keberlangsungan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan mencakup 4 pilar utama yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola pemerintahan.¹⁴

Berdasarkan 17 tujuan yang tersusun dalam 4 pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs) peneliti mengambil fokus pada pilar pembangunan sosial yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat meliputi hak pendidikan, kesehatan terutama hak dalam berkontribusi di ranah ekonomi secara merata sebagai landasan peningkatan hidup yang lebih berkualitas. Selain bertujuan mencapai pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan dan inklusi untuk lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pilar pembangunan sosial juga memiliki tujuan utama yakni memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pada pilar ini juga memastikan bahwa perempuan dapat terjun dan ikut serta dalam pembenahan maupun peningkatan perekonomian

¹³SDGS Center Universitas, “*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGS)*”, (Sumatra Utara:Center USU,2024),1.

¹⁴Asep Hidayat, “Implementasi Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Papatung*. Vol. 5, No.2,(2022),59.

yang setara dengan laki-laki.¹⁵

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang menjadi pembahasan menarik untuk dibahas mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di Bank Wakaf Mikro Amanah Sejahtera yang terletak di Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Sistem Tanggung Renteng Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Studi di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sistem tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri?
2. Bagaimana pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sistem tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sistem tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri.

¹⁵ SDGS Center Universitas, “*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGS)*”, (Sumatra Utara:Center USU,2024),4.

2. Untuk menjelaskan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui sistem tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera Kota Kediri dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif memiliki manfaat yang lebih condong kepada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga tidak mengesampingkan manfaat praktis dalam menyelesaikan masalah. Jika di masa depan penelitian kualitatif ini berhasil menemukan teori, hasilnya akan bermanfaat untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan berbagai gejala yang muncul. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi, serta memperluas pemahaman tentang ilmu ekonomi Islam baik bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para peneliti yang fokus pada pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau perbandingan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di Bank Wakaf Mikro dalam mencapai tujuan SDGs.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta

mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang memperkaya wawasan dan menambah pustaka, sekaligus memberikan masukan dalam bidang akademik lembaga keuangan non-perbankan di sektor perbankan syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi konkret untuk masalah yang ada di masyarakat, serta menghasilkan inovasi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, mendorong perubahan perilaku, dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pemahaman pembaca mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi-studi mendatang yang mengkaji tema serupa secara lebih mendalam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Ike Karismawati dengan judul “Implementasi Digitalisasi Dalam Mewujudkan Green Koperasi Perspektif Sustainable Development Goals (Studi Pada Koperasi Syari’ah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung Kediri)”.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang

¹⁶Ike Karismawati, “Implementasi Digitalisasi Dalam Mewujudkan Green Koperasi Perspektif Sustainable Development Goals (Studi Pada Koperasi Syari’ah Rizky Amanah Jaya (RAJA) Kepung Kediri)”, (Kediri:IAIN,2024)

dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam mewujudkan koperasi hijau dari perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada Koperasi Syari'ah Rizky Amanah Jaya Kepung telah selaras dengan pilar pembangunan lingkungan, termasuk menjaga sumber daya alam, air bersih, dan sanitasi yang layak. Penggunaan aplikasi Raja Mobile di Koperasi Syari'ah Rizky Amanah Jaya memberikan manfaat dengan meminimalkan limbah kertas dan mengurangi frekuensi pembakaran kertas, yang dapat menyebabkan pencemaran tanah dan udara. Digitalisasi juga mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi koperasi secara langsung, sehingga dapat menurunkan tingkat polusi yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Teknologi digital Raja Mobile, yang ramah lingkungan, berkontribusi pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan beralih dari metode manual ke digital, pengelolaan ekosistem di Syari'ah Rizky Amanah Jaya dapat melindungi lingkungan, mengurangi penggunaan kertas, dan menekan permintaan industri untuk penebangan pohon yang berperan dalam mengatur siklus air. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Ike Karismawati terletak pada fokus pada implementasi dan manfaat penggunaan koperasi hijau. Sementara itu, kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada sudut pandang masalah penelitian yang berhubungan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

2. Skripsi yang ditulis oleh Riska Putri Aprillia dengan Judul Penerapan *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Relevansinya Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Yayasan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Wahyu Alam Desa Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri)¹⁷. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Economy* yang dilakukan oleh TOGA Wahyu Alam mencakup beberapa strategi, seperti penerapan Green Jobs, pengurangan penggunaan listrik, serta penghematan air dalam proses produksi. Selain itu, kebijakan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga menjadi fokus utama. Yayasan TOGA Wahyu Alam berkomitmen pada aspek-aspek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pencapaian dalam pembangunan berkelanjutan melalui usaha *Green Economy* ini sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam lima pilar Maqashid Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Riska Putri Aprillia terletak pada fokus penelitian yang lebih mengarah pada penerapan *Green*

¹⁷Riska Putri Aprillia, “Penerapan *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Relevansinya Terhadap Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Yayasan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Wahyu Alam Desa Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, (Kediri: IAIN, 2023)

Economy dan relevansi masalah penelitian dengan Maqasid Syariah. Sementara itu, kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada tujuan yang sejalan, yaitu untuk mencapai *Sustainable Development Goals*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Anggun Oktaviana dengan judul “Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan”.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study) dan bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah berhasil mengimplementasikan *Program Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada poin pertama (*No Poverty*). Melalui program PKH (Program Keluarga Harapan) dan berbagai program lainnya, Dinas Sosial berupaya mengurangi kemiskinan di Kota Banda Aceh dengan menjalankan strategi yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program SDGs oleh Kota Banda Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik, mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selain itu, pengembangan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan telah

¹⁸Sri Anggun Oktaviana, “Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) Oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Kemiskinan”, (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry,2023)

memenuhi standar yang baik dan berkualitas.

Persamaan antara penelitian Sri Anggun Oktaviana dan penelitian ini terletak pada variabel program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diterapkan oleh lembaga terkait dalam mengatasi kemiskinan. Sementara itu, perbedaan terletak pada objek penelitian Sri Anggun Oktaviana yang lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Juwita Pratiwi Lukman dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan”.¹⁹ Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan studi kepustakaan melalui beberapa sumber buku, artikel ilmiah dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik secara lokal maupun regional. Dalam konteks ini, kebijakan beroperasi dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pemberdayaan perempuan. Kesejahteraan pekerja memberikan banyak keuntungan bagi pembangunan negara, karena memerlukan investasi pada anak atau pasangan pekerja. Menanamkan investasi pada sumber daya manusia dapat Meningkatkan akses terhadap pendidikan dan berbagai peluang karier. Pemberdayaan perempuan sebagai aktor ekonomi adalah faktor kunci dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Di

¹⁹Juwita Pratiwi Lukman, “Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan”, *Banjarese: Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol.2, No.8, (2024)

Indonesia, perempuan menyumbang jumlah angkatan kerja yang signifikan, dengan 60% dari mereka terlibat dalam usaha mikro. Perlindungan hak-hak ekonomi perempuan sangat penting untuk memastikan kesetaraan gender dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Pendidikan juga memainkan peran vital dalam memberdayakan perempuan dan masyarakat, membantu mereka mengembangkan keterampilan dan kemampuan multitasking. Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi langkah maju agar kebijakan dapat lebih menargetkan kepentingan kaum perempuan. Dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, perempuan hidup yang baik, serta melestarikan sumber daya alam.

Persamaan penelitian ini dengan topik yang akan dibahas terletak pada fokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Perbedaannya terletak pada studi kasus dan variabel penelitian, yaitu implementasi sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Syafrin Aulia Annis, Binti Mutafarida, Suprihantosa Sugiarto dan Yuliani dengan judul “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang”.²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan *qualitative research*, sedangkan pengumpulan data memakai metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan

²⁰Syafrin Aulia Annis, dkk, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dan Sistem Tanggung Renteng Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang”, *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol.8, No. 1, (2024)

data yang diambil melalui sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera telah dilakukan dengan baik dan efektif, mengikuti tahapan serta prosedur yang ditetapkan melalui penilaian berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition, of Economy*). Dari kelima prinsip tersebut, penilaian yang paling ditekankan adalah watak (*Character*) calon nasabah dalam menilai kelayakan mereka. Implementasi sistem tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dilakukan melalui beberapa langkah, termasuk identifikasi, sosialisasi, uji kelayakan nasabah, Pra PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan HALMI (Halaqah Mingguan). Penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem tanggung renteng ini terbukti dapat mengurangi angka pembiayaan bermasalah, yang terlihat dari penurunan persentase NPF (*Non Performing Financing*) setiap tahunnya.

Persamaan penelitian ini dengan topik yang akan dibahas terletak pada variabel penggunaan sistem tanggung renteng oleh lembaga dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Sementara itu, perbedaan terletak pada studi kasus dan fokus penelitian yang lebih mengarah pada pemberdayaan perempuan serta pengentasan kemiskinan dalam rangka mencapai SDGs.